



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
S.D. TRIWULAN III TAHUN 2023**

NOMOR : OT.04/LPP-2864/PW22/6/2023

TANGGAL : 2 OKTOBER 2023



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan Kapten Tantular, Kotak Pos 3054, Denpasar 80235
Telepon: (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771
E-mail: bali@bpkp.go.id Website: www.bpkp.go.id/bali.bpkp

Nomor : OT.04/LPP-2864/PW22.6/2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Triwulan III Tahun 2023

2 Oktober 2023

Yth. Sekretaris Utama
up. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Laksana
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan III Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Outcome Triwulan III Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja BPKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 tersaji pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Outcome Triwulan III Tahun 2023

No.	Sasprog/Saskeg/IKK	Satuan	Target		Realisasi Trw III	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)
			2023	Trw III		2023	s.d. Trw III	
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah							
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	2.168	1.500	3.361,42	155,05	224,09	
1.2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (juta)	136.270	80.000	96.693,04	70,96	120,87	
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (juta)	56.684	20.000	4.410,05	7,78	22,05	
	Capaian Rata-Rata					-		77,93
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional							
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	-	-	-	NA	
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	2	100,00	200,00	
	Capaian Rata-Rata					-		100,00
III	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP							
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	(%) Persen	80	-	-	-	NA	
	Capaian Rata-Rata					-		-

No.	Sasprog/Saskeg/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)
			2023	Trw III	Trw III	2023	s.d. Trw III	
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha							
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	-	-	-	NA	
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	9	100,00	100,00	
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	2	200,00	200,00	
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59	-	-	-	NA	
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	20	-	-	-	NA	
	Capaian Rata-Rata					-		150,00
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi							
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100	-	-	-	NA	
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	85	-	-	-	NA	
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	-	-	-	NA	
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	-	-	-	NA	
	Capaian Rata-Rata					-		-
VI	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU							
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00	
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	8	7	7	87,50	100,00	
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00	
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	9	9	9	100,00	100,00	
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00	
6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	4	3	3	75,00	100,00	
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	10	3	3	30,00	100,00	
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	25	636	2.544,00	2.544,00	
6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	25	35	140,00	140,00	
6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	2	0	-	NA	NA	
6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	10	0	-	NA	NA	
6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1	-	-	NA	NA	
6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	3	-	-	NA	NA	
	Capaian Rata-Rata							364,04

No.	Sasprog/Saskeg/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)
			2023	Trw III	Trw III	2023	s.d. Trw III	
VII	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan							
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	-	-	-	NA	
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	-	-	-	NA	
7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	-	-	-	NA	
7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	90,00	100,00	100,00	111,11	
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	-	-	-	NA	
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	95,00	95,43	100,45	100,45	
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	-	-	-	NA	
	Capaian Rata-Rata							100,23
	Capaian Rerata Kinerja Triwulan III							158,44

Tabel 1 disajikan kembali pada Lampiran 1.

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut.

1

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” ditunjukkan oleh pencapaian 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu

1. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi;
2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah; dan
3. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) IKK yang telah ditetapkan target kerjanya, sebagaimana uraian berikut:

1.1 Nilai optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

IKK “Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi” menggambarkan sejauh mana nilai realisasi penerimaan negara/daerah yang dapat dioptimalisasi melalui kegiatan pengawasan BPKP.

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi diukur dari jumlah kurang bayar atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk PNPB berdasarkan bukti setor
- b. Untuk Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan
- c. Untuk PAD berdasarkan Surat Ketetapan

Pada Triwulan III tahun 2023, nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang terealisasi sebesar Rp3.361.421.704,81 atau tercapai 155,05% dari target sebesar Rp2.168.000.000,00. Nilai tersebut merupakan hasil optimalisasi pengawasan OPAD pada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Kabupaten Gianyar dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penerimaan	Potensi OPAD (Rp)
1	Pajak Hotel	540.895.033,00
2	Pajak Restoran	2.050.125.829,00
3	Pajak Air Tanah	714.413.074,00
4	Pajak Hiburan	7.236.574,00
5	Pajak Penerangan Jalan	61.097,81
Total		3.361.421.704,81

Selain menerima konsultasi dari beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Bali terkait teknis dan pengawasan pendapatan daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Bali memiliki Kantor Pengelola Diklat yang merupakan kepanjangan dari Pusdiklatwas BPKP Ciawi juga memfasilitasi permintaan pemerintah daerah di Provinsi Bali maupun diluar Provinsi Bali dalam meningkatkan kompetensi APIP masing-masing Pemerintah Daerah, melaksanakan Audit atas Pendapatan Daerah.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

1. Melakukan asistensi Teknik pengelolaan pajak daerah bagi tim pengelola pajak di Pemerintah Daerah;
2. Melakukan sosialisasi/bimbingan teknis perpajakan dan retribusi daerah dalam rangka membangun kesadaran Masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” menunjukkan besarnya pengurangan/pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) tidak tepat berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Menilai efisiensi dan kesesuaian belanja dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kriteria yang berlaku yakni:

- a. Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
 1. Dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat;
 2. Rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat;
 3. Ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- b. Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving* dan sebagainya.

Realisasi IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” triwulan III tahun 2023 sebesar Rp96.693.040.329,94 atau tercapai 70,96% dari target Rp136.270.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Topik APP	Nilai Efisiensi (Rp)
1	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu	16.452.342.540,00
2	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	53.383.792.429,00
3	BUMN	24.354.851.744,13
4	Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1.370.432.520,00
5	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	1.105.122.092,67
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan	26.499.004,00
Total		96.693.040.329,94

Pengawasan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

- a. Evaluasi akuntabilitas pengamanan dan pengawasan Pemilu pada KPU dan Bawaslu pada Provinsi Bali, Kabupaten Badung, dan Kota Denpasar;
- b. Evaluasi perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- c. Evaluasi atas Pembiayaan Daerah Tahun 2023 pada Kabupaten Gianyar;
- d. Evaluasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Daerah Tahun 2023 pada Provinsi Bali;
- e. Reviu Usulan Penyertaan Modal Negara pada Pembangunan Bung Karno *Convention Center* di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur;
- f. Audit Penyesuaian Harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau Aspal atas Paket Preservasi Jalan Gilimanuk – Cekik – Seririt Batas Kota Singaraja pada Satuan Kerja Proyek Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bali di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali Tahun Anggaran 2022;
- g. Audit Penyesuaian Harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau Aspal atas Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Cekik – Batas Kota Negara – Pekutatan – Antosari – Batas Kota Tabanan pada Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Bali di Lingkungan BBPJN Jawa Timur – Bali Tahun Anggaran 2022;
- h. Audit Penyesuaian Harga akibat kenaikan harga BBM dan/atau Aspal atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar – Gilimanuk (Tukad Yeh Otan) pada Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Bali di Lingkungan BBPJN Jawa Timur – Bali Tahun Anggaran 2022;
- i. Audit Penyesuaian Harga atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja – Mengwitani Titik 7A, 7B, 7C dan Titik 8;
- j. Audit Penyesuaian Harga atas Paket Preservasi Jalan Dan Jembatan Simpang Pesanggaran – Nusa Dua, Jimbaran – Uluwatu Dan Penataan Lanskap Bundaran, Pedestrian, Dan Median Ruas Jalan Bandara Ngurah Rai – Venue;
- k. Audit Penyesuaian Harga atas Paket Penggantian Jembatan Ruas Simpang Cokroaminoto - Simpang Tohpati (Jalan Gatot Subroto Timur).

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja ini antara lain:

1. Mendorong dan meningkatkan pemahaman Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat Daerah untuk lebih intensif mengawal perencanaan dan penganggaran melalui optimalisasi pelaksanaan reviu dan pemetaan risiko tingkat strategis maupun operasional;
2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis SPIP dan manajemen Risiko bagi instansi vertical untuk mengawal perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan APBN;
3. Bersinergi dengan inspektorat daerah untuk meningkatkan tindak lanjut atas hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

IKK “Nilai penyelamatan keuangan negara” menunjukkan besarnya jumlah temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan/atau pemulihan hak negara atas aset negara.

IKK ini diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan nilai asset yang dipulihkan, misalnya melalui kegiatan audit investigasi, audit PKKN dan audit lainnya.

Realisasi IKK “Nilai penyelamatan keuangan negara” pada triwulan III tahun 2023 sebesar Rp4.410.045.516,20 atau tercapai 22,05% dari target Rp20.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Topik APP	Nilai Efisiensi (Rp)
1	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	2.957.220.355,00
2	Efektivitas Transfer ke Daerah	738.000,00
3	Penugasan Pengawasan atas Permintaan K/L dan/atau Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan	1.452.087.161,20
Total		4.410.045.516,20

Pengawasan yang mendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Keuangan LPD Desa Adat Umahanyar, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Periode Tahun 2017 s.d. 30 Juni 2021;
- Evaluasi atas Efektivitas Penggunaan Transfer ke Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Audit atas Pembayaran Penanganan Tanggap Darurat Jembatan Tukad Biluk Poh di Kabupaten Jembrana;
- Audit atas Pembayaran Sisa Pekerjaan Tahun 2022 yang Diselesaikan Tahun 2023 pada Pekerjaan Pembangunan Prasarana Pengamanan Pantai Ruas Gilimanuk di Kabupaten Jembrana - Selemadeg di Kabupaten Tabanan.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan

- Meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) secara intensif agar kasus yang sedang ditangani dapat dikonsultasikan terlebih dahulu, guna meyakinkan layak/tidaknya kasus tersebut ditindaklanjuti dengan audit PKKN atau audit investigasi;
- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar pemenuhan data dukung dapat dilaksanakan secara optimal guna mendukung penugasan;
- Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan BPKP terkait dengan adanya koreksi/penyelamatan keuangan negara;
- Menguatkan peran Inspektorat daerah untuk melakukan kegiatan investigasi;
- Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan APH dan Inspektorat Daerah.

2

Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

- Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan; dan
- Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, IKK Persentase hambatan pelaksanaan Pembangunan yang ditetapkan targetnya sebesar 85% belum ada realisasinya dikarenakan hal tersebut adalah target realisasi di Triwulan IV.

Untuk IKK jumlah kegiatan prioritas daerah yang diawasi yang telah ditetapkan target kinerjanya yaitu:

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” menunjukkan jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKP) tahun tertentu yang diawasi dengan kegiatan pengawasan BPKP. Pengawasan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan prioritas nasional daerah mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur dengan menjumlahkan kegiatan prioritas daerah yang diawasi dengan kegiatan pengawasan perwakilan pada tahun berjalan.

Realisasi IKK “Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi” sampai dengan Triwulan III tahun 2023 adalah sebanyak dua kegiatan prioritas daerah atau mencapai 100% dari target sebanyak dua kegiatan prioritas daerah yang diawasi tahun 2023. Kegiatan yang diawasi adalah Program Transformasi Ekonomi Bali melalui Pengembangan Kawasan Wisata Upanan dan Program Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Provinsi Bali.

3

Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kesadaran Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi Tanggung Jawab Perwakilan BPKP” ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja “Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti”.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, tidak terdapat target atas IKK ini maupun realisasi kinerjanya.

4

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” ditunjukkan oleh pencapaian 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik;
2. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat;
3. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat;
4. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan; dan
5. Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, terdapat dua IKK yang telah ditetapkan target kinerjanya, sebagaimana uraian berikut:

4.1 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” menunjukkan jumlah BUMD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun asesor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk mendukung IKK ini antara lain melakukan tindak lanjut ini antara lain melakukan tindak lanjut atas rekomendasi *AoI* yang diberikan. IKK ini diukur dengan jumlah BUMD dengan kinerja minimal “Sehat” pada tahun berjalan.

Realisasi IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 9 BUMD atau 100,00% dari target 9 BUMD. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian kinerja Tahun Buku 2023 atas 9 BUMD di wilayah

Provinsi Bali, yang seluruhnya memperoleh predikat “Sehat” atau nilai kriteria tingkat kesehatan di atas 2,9. Sembilan BUMD tersebut adalah

1. Perumda Air Minum Tirta Mangutama Kabupaten Badung;
2. Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli;
3. Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
4. Perumda Air Minum Tirta Amerta Jati Kabupaten Jembrana;
5. Perumda Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
6. Perumda Tirta Tohlangkir Kabupaten Karangasem;
7. Perumda Air Minum Panca Mahottama Kabupaten Klungkung;
8. Perumda Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan;
9. Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.

Sampai dengan triwulan III Tahun 2023, perwakilan telah melaksanakan evaluasi kinerja pada 13 BUMD, dengan hasil sembilan BUMD memperoleh predikat sehat dan empat BUMD memperoleh predikat kurang sehat.

4.2 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” menunjukkan banyaknya BLUD dengan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun *assessor* lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”. Kegiatan pengawasan untuk mendukung IKK ini yakni melakukan audit kinerja pada BLUD dan memantau tindak lanjut atas rekomendasi *AoI* yang diberikan. IKK ini diukur dengan jumlah BLUD dengan kinerja minimal “Sehat” pada tahun berjalan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, realisasi IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak dua BLUD/D dengan kinerja sehat atau 100% dari target satu BLUD. Realisasi tersebut merupakan hasil evaluasi atas kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Wangaya Kota Denpasar Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Pendidikan Tinggi pada Universitas Pendidikan Ganesha Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dengan kinerja baik/sehat.

5

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” ditunjukkan oleh pencapaian 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
2. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti;
3. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik; dan
4. Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, tidak terdapat target atas keempat IKK tersebut maupun realisasi kerjanya.

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” ditunjukkan oleh pencapaian 13 indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3;
3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3;
5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3;
6. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3;
7. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah;
8. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel;
9. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai;
10. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3;
11. Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3;
12. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3;
13. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, dari 13 IKK terdapat 9 (sembilan) IKK yang telah ditetapkan target kinerjanya, yang diuraikan sebagai berikut:

6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan sendiri/penilaian mandiri oleh APIP K/L/Pemda menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP, yang selanjutnya dievaluasi oleh BPKP.

IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” mencerminkan bahwa hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D.

Inspektorat Provinsi Bali telah berada pada level 3. Dengan demikian, realisasi IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada triwulan III tahun 2023 sebanyak satu APIP atau tercapai 100% dari target sebesar satu APIP.

6.2 Jumlah APIP Kabupaten/ Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Kapabilitas APIP \geq Level 3, IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” juga mencerminkan bahwa hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi organisasi K/L/D. Sampai dengan triwulan III tahun 2023, realisasi IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” di Provinsi Bali sebanyak 7 APIP atau tercapai 87,50% dari target sebesar 8 APIP. APIP pemerintah kabupaten/kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagai berikut:

Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Nama APIP	Level	Status
APIP yang berada pada level 3:			
1	Inspektorat Kabupaten Badung	3	Telah terbit SP Deputi
2	Inspektorat Kabupaten Tabanan	3	
3	Inspektorat Kabupaten Klungkung	3	
4	Inspektorat Kota Denpasar	3	
5	Inspektorat Kabupaten Gianyar	3	
6	Inspektorat Kabupaten Bangli	3	
7	Inspektorat Kabupaten Buleleng	3	
APIP yang berada pada 2+:			
1	Inspektorat Kabupaten Jembrana	2+	Telah terbit SP Deputi
2	Inspektorat Kabupaten Karangasem	2+	

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- a. Melaksanakan bimtek/sosialisasi audit kinerja pada seluruh APIP di Provinsi Bali;
- b. Melakukan pemantauan tindak lanjut rencana aksi peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Buleleng dan Inspektorat Kabupaten Bangli;
- c. Melaksanakan pendampingan penilaian mandiri dan evaluasi atas hasil penilaian mandiri pada APIP yang belum mencapai level 3 yaitu Inspektorat Kabupaten Jembrana dan Inspektorat Kabupaten Karangasem;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi dengan APIP dalam mengembangkan kompetensi dan peningkatan kualitas hasil pengawasan.

6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Maturitas SPIP K/L/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Level 3 merupakan tingkat minimal maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/Pemda. Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah.

IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah Provinsi dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan jumlah provinsi pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Pemerintah Provinsi Bali memiliki maturitas SPIP pada Level 3. Dengan demikian, realisasi IKK “Jumlah provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah sebanyak 1 Pemda atau tercapai 100% dari target 1 Pemda.

6.4 Jumlah Kabupaten/ Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan jumlah Kabupaten/Kota pada wilayah kerja

pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Maturitas SPIP seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali telah berada pada level **3**. Dengan demikian realisasi IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada triwulan III tahun 2023 adalah sebanyak 9 Kabupaten/Kota atau tercapai 100% dari target 9 Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKK tersebut sampai dengan triwulan ini adalah monitoring tindak lanjut penilaian SPIP Terintegrasi pada sembilan Kabupaten/Kota.

6.5 Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” mencerminkan jumlah Pemda yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan jumlah Pemerintah Provinsi yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

MRI Provinsi Bali berada pada level 3. Dengan demikian realisasi IKK “Jumlah Pemerintah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” sampai dengan triwulan III tahun 2023 adalah sebanyak satu pemerintah provinsi atau tercapai 100% dari target satu pemerintah provinsi.

6.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3

IKK “Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3” mencerminkan jumlah Provinsi yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, realisasi IKK “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” adalah sebanyak tiga Kabupaten/Kota atau tercapai 75% dari target tiga Kabupaten/Kota. Ketiga pemerintah daerah dengan MRI \geq Level 3 yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- a. Melakukan bimbingan teknis manajemen risiko kepada Pemerintah Daerah dengan MRI belum mencapai level 3;
- b. Melakukan asistensi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP bagi pemerintah daerah dengan MRI belum mencapai level 3.

6.7 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

IKK “Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah” menunjukkan tingkat akuntabel (efisien dan efektif) pemda dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. IKK ini diukur dengan menjumlahkan pemda yang memperoleh Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, sebanyak tiga Pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB atau 30% dari target Tahun 2023 sebanyak sepuluh pemda. Pemda di wilayah Provinsi Bali yang mendapat opini WTP dan SAKIP BB adalah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan:

- a. Melaksanakan asistensi peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah pada pemerintah daerah di Provinsi Bali;
- b. Menerima kegiatan konsultasi terkait peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan strategi pencapaian *ultimate outcome* pada pemerintah daerah.

6.8 Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel

IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel” menunjukkan tingkat ketaatan Pemerintah Desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan. IKK dihitung dengan menjumlahkan desa yang telah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Seluruh desa di Provinsi Bali atau 636 desa telah menggunakan aplikasi Siskeudes versi 2.0 dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangannya dan telah melaksanakan secara *online*. Dengan demikian realisasi IKK “Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel” sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 636 desa atau 2.544% dari target 25 desa.

6.9 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Mandiri

IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa secara Memadai” mencerminkan sejauh mana Pemerintah Desa telah menerapkan pengelolaan aset desasesuai ketentuan. IKK ini diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pengelolaan aset desa sebanyak 35 desa telah menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai. Dengan demikian, sampai triwulan III tahun 2023 IKK ini terealisasi 35 desa atau 140% dari target 25 desa. Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

Kabupaten Buleleng		Kabupaten Tabanan	
1) Pemuteran	16) Munduk	1) Delod Peken	
2) Celukanbawang	17) Gitgit	2) Sesandan	
3) Sumberkima	18) Pegadungan	3) Dajan Peken	
4) Unggahan	19) Sambangan	4) Peken Belayu	
5) Bubunan	20) Kalibukbuk	5) Kuku	
6) Munduk bestala	21) Pemaron		
7) Gunungsari	22) Alasangker		
8) Subuk	23) Sangsit		
9) Busungbiu	24) Sekumpul		
10) Umejero	25) Bungkulan		
11) Banyuatis	26) Depeha		
12) Gobleg	27) Tamblang		
13) Bengkala	28) Mengening		
14) Tejakula	29) Julah		
15) Les	30) Madenan		

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan” ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja;
2. Nilai SAKIP Unit Kerja;
3. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja);
4. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja);
5. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja;
6. Skor IKPA Unit Kerja; dan
7. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, dari 8 (delapan) IKK terdapat 2 (dua) IKK dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

7.1 Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)

IKK “Persentase penyelesaian Rencana Tindak Pengendalian (RTP) (MRI unit kerja)” mencerminkan jumlah realisasi Rencana Tindak Pengendalian yang diselesaikan dibandingkan jumlah RTP setahun. Pengukuran IKK dilakukan menggunakan aplikasi RMIS.

Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja) tahun 2023 yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan III sebesar 111,11% dari target kinerja pada tahun 2023. Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan 22 RTP atau 100,00% dari target sebanyak 22 RTP pada tahun 2023. Rencana tindak untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain dengan meningkatkan koordinasi Satgas Penyelenggaraan MR Perwakilan dalam mengoptimalkan implementasi MR.

7.2 Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Unit Kerja

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKK “Skor IKPA Unit Kerja” bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan laporan keuangan. Pengukuran IKK ini berdasarkan hasil penilaian IKPA oleh Kementerian Keuangan.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, realisasi IKK “Skor IKPA Unit Kerja” sebesar 95,43 dari skala 100 atau 100,45% dari target 95,00. Realisasi tersebut merupakan hasil penilaian pelaksanaan anggaran per Agustus tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan sesuai data aplikasi OM SPAN.

B. Capaian *Output* Pengawasan Triwulan III Tahun 2023

Realisasi *output* Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali per Triwulan III Tahun 2023 yang diambil dari Aplikasi Monsima sebanyak 62 laporan (Sintesa Hasil Pengawasan), mencapai 80,52% dari target tahun 2023 sebanyak 77 laporan, dengan ringkasan sebagaimana pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan III Tahun 2023

No		Unit Kerja/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi s.d. Tw. III 2023	Capaian (%)
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	-	-
2	FAG.U1 1	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	5	6	120,00
3	FAG.U3 1	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	5	6	120,00
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	24	20	83,33
5	UAG.U2 1	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	7	8	114,29
6	UAG.U2 2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	7	6	85,71
7	UAG.U2 3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	6	6	100,00
8	UAG.U2 4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	8	8	100,00
9	UAG.U2 7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah – Perencanaan	2	1	50,00
10	UAG.U2 7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah – Pelaksanaan			
11	UAG.U2 7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah – Pelaporan			
12	UAG.U2 7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Monitoring TL			
13	UAG.U4 1	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	2	-	-
14	UAG.U5 2	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	5	1	20,00
15	UAG.U5 3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	-	-
		Jumlah	77	62	80,52

Capaian output pengawasan sampai dengan Triwulan III disajikan pada Lampiran 2a dan Lampiran 2b.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III dengan Realisasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2022) dan Target Akhir Renstra (Tahun 2024)

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kinerja Program/Kegiatan						
				Realisasi		%	Realisasi TW III 2023	Renstra 2024	%	
				Trw III 2023	2022					
1	2	3	4	5	6	7=5/6				
A. Program Pengawasan Pembangunan										
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	1.171,96	4.264,46	27,48	1.171,96	1.016	115,35
		2	Nilai Efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	80.532,42	438.685,45	18,36	80.532,42	112.930	71,31
		3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	4.410,05	5.307,47	83,09	4.410,05	51.982	8,48
Rerata Capaian Saskeg 1										
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	4	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	-					NA
		5	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2,00	100,00	2	9	22,22
Rerata Capaian Saskeg 2										
3	Meningkatnya	6	Persentase rekomendasi strategis yang	(%) Persen	-					NA
Rerata Capaian Saskeg 3										
4	Meningkatnya	7	Jumlah BUMD dengan pengelolaan	BUMD	-					NA
		8	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	100,00	9	9	100,00
		9	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	2	2	100,00	2	1	200,00
		10	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun	BUMDes	-					NA
		11	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi	BUMDes	-					NA
Rerata Capaian Saskeg 4										
5	Meningkatnya	12	Persentase hasil pengawasan represif yang	(%) Persen	-					NA
		13	Persentase hasil Pengawasan preventif dan	(%) Persen	-					NA
		14	Jumlah Pemda dengan efektivitas	Pemda	-					NA
		15	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas	Badan	-					NA
Rerata Capaian Saskeg 5										
6	Meningkatnya	16	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP	Provinsi	1	1	100,00	1	1	100,00
		17	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan	Kabupaten/K	7	7	100,00	7	9	77,78
		18	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >=	Provinsi	1	1	100,00	1	1	100,00
		19	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas	Kabupaten/K	9	9,00	100,00	9	9	100,00
		20	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1	1	100,00	1	1	100,00
		21	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/K	3	3	100,00	3	4	75,00
		22	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	3	3	100,00	3	1	300,00
		23	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	636	636	100,00	636	413	153,99
		24	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	35	30	116,67	35	176	17,05
		25	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	-					
		26	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	-					
		27	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >=	BUMD	-					
	28	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >=	BLU/D	-						
Rerata Capaian Saskeg 6										
Capaian Rerata Saskeg Pengawasan										

D. Kendala Pencapaian Target dan Rencana Tindak

Pada Triwulan III Tahun 2023, pencapaian target tidak menemui kendala. Rencana tindak untuk mencapai target pada triwulan berikutnya antara lain:

1. Melakukan sinergi intern antar bidang pengawasan untuk kegiatan yang berkaitan dan mengatur strategi pemenuhan SDM sesuai prioritas batas waktu yang ditetapkan rendal;
2. Menindaklanjuti hasil bimtek penilaian zona integritas dari Inspektorat BPKP;
3. Merealisasikan rencana aksi/tindak untuk pencapaian kinerja pada masing-masing IKK;
4. Aktif melakukan koordinasi dengan rendal dan mitra kerja sehingga rencana pengawasan dapat dilaksanakan tepat waktu.

E. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar Rp19.181.889.554,00 atau 77,33% dari total anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 sebesar Rp24.804.866.000,00, dengan ringkasan sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Keuangan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan III Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw. III 2023 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	21.066.764.000	17.092.757.876	81,14
Program 06 (Pengawasan Intern)	3.738.102.000	2.089.131.678	55,89
Jumlah	24.804.866.000	19.181.889.554	77,33

F. Analisis Efisiensi

Secara umum, proses kegiatan operasional BPKP telah dilaksanakan secara efisien ditinjau dari penggunaan dana dan SDM. Rerata capaian efisiensi kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan III Tahun 2023 adalah sebesar 195,16% untuk penggunaan dana dan 223,84% untuk penggunaan SDM.

Rincian analisis efisiensi penggunaan dana dan SDM BPKP s.d. Triwulan III Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.

Program	Capaian Input (%)		Capaian Outcome	Efisiensi	
	Dana	SDM		Dana	SDM
Program 1 (Dukungan Manajemen)	55,89	82,61	100,23	179,34	121,32
Program 06 (Pengawasan Intern)	81,14	63,00	173,00	213,22	274,60
	77,33	67,32	158,44	204,89	235,34

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Perwakilan

Ditandatangani secara elektronik oleh

Muhammad Masykur

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
S.D. TRIWULAN III TAHUN 2023**

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan						Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)	Anggaran			SDM		
			Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)			Pagu 2023 (Rp)	Realisasi (Rp) s.d. Trw III	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH) s.d. Trw	%
				2023	Trw III	Trw III	2023	Trw III							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
A. Program Pengawasan Pembangunan															
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2,168	1,500	3,361.42	155.05	224.09							
		2 Nilai Efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	136,270	80,000	96,693.04	70.96	120.87							
		3 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56,684	20,000	4,410.05	7.78	22.05							
Rerata Capaian Saskeg 1									77.93						
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	4 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85	-	-	-	NA							
		5 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	1	2	100.00	200.00							
Rerata Capaian Saskeg 2									100.00						
3	Meningkatnya	6 Persentase rekomendasi strategis yang	(%) Persen	80	-	-	-	NA							
Rerata Capaian Saskeg 3									-						
4	Meningkatnya	7 Jumlah BUMD dengan pengelolaan	BUMD	1	-	-	-	NA							
		8 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	9	9	100	100.00							
		9 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	2	200	200.00							
		10 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun	BUMDes	59	-	-	-	NA							
		11 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi	BUMDes	20	-	-	-	NA							
Rerata Capaian Saskeg 4									150.00						
5	Meningkatnya	12 Persentase hasil pengawasan represif yang	(%) Persen	100	-	-	NA	NA							
		13 Persentase hasil Pengawasan preventif dan	(%) Persen	85	-	-	NA	NA							
		14 Jumlah Pemda dengan efektivitas	Pemda	3	-	-	NA	NA							
		15 Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas	Badan	2	-	-	NA	NA							

No	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan						Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)	Anggaran			SDM		
			Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)			Pagu 2023 (Rp)	Realisasi (Rp) s.d. Trw III	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH) s.d. Trw	%
				2023	Trw III	Trw III	2023	Trw III							
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		
			Rerata Capaian Saskeg 5												
6	Meningkatnya	16	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas	Provinsi	1	1	1	100.00	100.00						
		17	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan	Kabupaten/K	8	7	7	87.50	100.00						
		18	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >=	Provinsi	1	1	1	100.00	100.00						
		19	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas	Kabupaten/K	9	9	9	100.00	100.00						
		20	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100.00	100.00						
		21	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/K	4	3	3	75.00	100.00						
		22	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam	Pemda	10	3	3	30.00	100.00						
		23	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya	Desa	25	25	636	2,544.00	2,544.00						
		24	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan	Desa	25	25	35	140.00	140.00						
		25	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	2	0	-	NA	NA						
		26	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	10	0	-	NA	NA						
		27	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >=	BUMD	1	0	-	NA	NA						
28	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >=	BLU/D	3	0	-	NA	NA								
			Rerata Capaian Saskeg 6						364.06						
			Capaian Rerata Saskeg Pengawasan						173.00	3,738,102,000	2,089,131,678	55.89	4,233	3,497	82.61
B Program Dukungan Manajemen															
7	Meningkatnya Tata	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala	75	-	-	-	NA						
		2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala	82	-	-	-	NA						
		3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern	(%) Persen	70	-	-	-	NA						
		4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit	(%) Persen	100	90.00	100.00	100.00	111.11						
		5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala	75	-	-	-	NA						
		6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala	95	95.00	95.43	100.45	100.45						
		7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala	80	-	-	-	NA						
			Rerata Capaian Saskeg 7						100.23	21,066,764,000	17,092,757,876	81.14	14,965	9,428	63.00
			Total						158.44	24,804,866,000	19,181,889,554	77.33	19,198	12,925	67.32

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TRIWULAN III TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan/Program			Rincian Output (RO)				Kinerja RO				Anggaran			SDM			Efisiensi Dana	Efisiensi SDM
							Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)	%		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15				
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan	24	20	83.33	1,062,754,000	575,548,627	54.16	1,197	895	74.77	Efisien	Efisien		
			2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan	5	6	120.00	201,720,000	158,926,176	78.79	324	309	95.37	Efisien	Efisien		
			3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	7	8	114.29	329,859,000	276,684,800	83.88	566	529	93.46	Efisien	Efisien		
			4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan	6	6	100.00	152,710,000	129,692,000	84.93	495	564	113.94	Efisien	Blm Efisien		
			Sub Jumlah Saskeg 1			42	40	95.24	1,747,043,000	1,140,851,603	65.30	2,582	2,297	88.96	Efisien	Efisien		
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional		5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Laporan	7	6	85.71	268,490,000	138,758,750	51.68	540	321	59.44	Efisien	Efisien		
			6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan	8	8	100.00	58,112,000	41,655,125	71.68	339	395	116.52	Efisien	Blm Efisien		
			7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah	Laporan	2	1	50.00	122,400,000	35,552,000	29.05	249	51	20.48	Efisien	Efisien		
			Sub Jumlah Saskeg 2			17	15	88.24	449,002,000	215,965,875	48.10	1,128	767	68.00	Efisien	Efisien		
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada		8	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	2	0	0.00	150,000,000	23,644,770	15.76	27	42	155.56	Blm Efisien	Blm Efisien		
						Sub Jumlah Saskeg 3			2	0	0.00	150,000,000	23,644,770	15.76	27	42	155.56	Blm Efisien
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha		9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan	5	6	120.00	108,504,000	83,947,000	77.37	285	324	113.68	Efisien	Efisien		
						Sub Jumlah Saskeg 4			5	6	120.00	108,504,000	83,947,000	77.37	285	324	113.68	Efisien
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas		10	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan		2	0	0.00	84,448,000	68,739,000	81.40	42	16	38.10	Blm Efisien	Blm Efisien		
						Sub Jumlah Saskeg 5			2	0	0.00	84,448,000	68,739,000	81.40	42	16	38.10	Blm Efisien
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU		11	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Laporan	5	1	20.00	1,092,185,000	532,358,722	48.74	127	41	32.28	Blm Efisien	Blm Efisien		
			12	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Laporan	4	0	0.00	106,920,000	23,624,708	22.10	42	10	23.81	Blm Efisien	Blm Efisien		
						Sub Jumlah Saskeg 6			9	1	11.11	1,199,105,000	555,983,430	46.37	169	51	30.18	Blm Efisien
Pengawasan Intern						77	62	80.52	3,738,102,000	2,089,131,678	55.89	4,233	3,497	82.61	Efisien	Blm Efisien		

Sasaran Kegiatan/Program			Rincian Output (RO)				Kinerja RO				Anggaran			SDM		Efisiensi Dana	Efisiensi SDM
							Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH)	Realisasi (OH)		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15		
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	Pelaksanaan Dukungan Manajemen BPKP	13	Layanan Umum	layanan	1	1	100.00	627,680,000	503,382,448	80.20						
			14	Layanan Perkantoran	layanan	1	1	100.00	19,180,084,000	16,364,376,428	85.32						
			15	Layanan Sarana Internal	unit	14	14	100.00	79,000,000	75,000,000	94.94						
			16	Layanan Prasarana Internal	unit	8	0	0.00	1,180,000,000	149,999,000	12.71						
Dukungan Pengawasan			Sub Jumlah Saskeg 7				24	16	66.67	21,066,764,000	17,092,757,876	81.14	14,965	9,428	63.00	Blm Efisien	Efisien
Total						101	78	77.23	24,804,866,000	19,181,889,554	77.33	19,198	12,925	67.32	Blm Efisien	Efisien	